



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI I DPR RI
KE PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2010 - 2011
TANGGAL 19 – 22 DESEMBER 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010**

BAB I PENDAHULUAN

I. UMUM

Setiap reses masa persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi I DPR RI telah membentuk beberapa tim kunjungan kerja dimana salah satunya adalah tim kunjungan kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Barat. Laporan berikut adalah hasil temuan tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

III. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : /PIMP/II/2010-2011, tanggal Desember 2010 tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I s/d Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010 - 2011. Selanjutnya, kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010. Jumlah seluruh tim adalah 16 (enam belas) orang dengan komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI dan 3 (tiga) orang pendamping/penghubung Kemhan. (*terlampir*)

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

I. PROFIL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah wilayah di Bagian Tengah Indonesia dengan ibu kota Mataram. Saat ini, Propinsi Maluku dipimpin oleh Gubernur KH. M. Zainul Majdi, M.A dan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, M.M. Terkait dengan kunjungan Komisi I DPR RI ini, Gubernur berhalangan hadir karena menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sehingga diwakili oleh Wakil Gubernur. Namun demikian, wagub sendiri tidak bisa sepenuhnya mengikuti acara, karena harus menghadiri paripurna DPRD dan dilanjutkan oleh Sekda Prop. NTB.

Propinsi NTB terdiri dari 2 pulau besar, yaitu pulau Lombok dan Sumbawa, dikelilingi 137 pulau-pulau kecil (70 buah di perairan pulau Lombok dan 65 buah di perairan pulau Sumbawa). Luas wilayahnya adalah 49.312,19 km², terdiri dari 20.153,15 km² daratan dan 29.159,04 km² lautan. Jumlah penduduk NTB berdasarkan sensus tahun 2010 tercatat sebanyak 4,496,855 jiwa yang sebagian besar beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Penyebaran penduduk tidakimbang. 2/3 penduduk berdomisili di Pulau Lombok dibanding Pulau Sumbawa yang lebih besar. Demikian juga dengan pembangunan dimana Pulau Sumbawa relatif tertinggal dibandingkan dengan Lombok.

Secara administratif, NTB dibagi menjadi 10 daerah kabupaten/kota yaitu: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Sumbawa Barat.

Ditinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di Pulau Lombok, suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ketiga suku tersebut dapat berdampingan dengan damai.

Selain tiga etnis besar, ada juga beberapa etnis atau suku pendatang yang tinggal di NTB. Mereka biasanya hidup dalam sebuah kampung tersendiri dan menamakan kampungnya dengan nama asal muasal tempat atau etnis/suku mereka seperti Kampung Jawa untuk orang-orang Jawa, Kampung Irian untuk orang Irian/Papua dan lain-lain. Sampai saat ini memang belum pernah terjadi adanya konflik masyarakat atas dasar etnis. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di NTB adalah masyarakat yang menghargai keragaman etnis dan budaya. Namun bagaimanapun juga, di sisi lain, pengelompokan etnis atau suku tertentu ke dalam sebuah desa menunjukkan adanya pemilahan yang tradisional dan bukan fungsional. Hal ini pada tahap lanjut ke depan justru membahayakan karena ketika konflik etnis/suku muncul, maka polarisasi dan segregasi masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu sangat mudah terjadi dan membuat konflik semakin meningkat.

Propinsi ini mempunyai keunikan tersendiri karena menjadi tempat bertemunya tiga kebudayaan besar yaitu kebudayaan Jawa Kuno, Islam dan Hindu

Bali. Sementara itu, upacara adat maupun keagamaan di Pulau Lombok menunjukkan adanya pengaruh dari budaya Hindu dan Islam. Kebudayaan-kebudayaan tersebut hingga saat ini masih berkembang dan berakar pada masyarakat di NTB. Bangunan yang bercorak pembauran antara Hindu, Islam, dan Jawa Kuno dapat ditemukan di beberapa daerah.

Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat menonjol adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya pengaruh kehidupan beragama yang sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh sistem patriarkhis. Interpretasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan lelaki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Gubernur NTB sendiri merupakan salah satu tokoh agama yang dikenal dengan sebutan "tuan guru haji" atau dalam bahasa lain disebut *kiayi haji*.

Dalam sektor ekonomi, NTB menekankan prioritas pada 3 sektor yaitu sapi, jagung dan rumput laut atau disebut dengan PIJAR atau dengan slogan TRIMUNA, yakni kepedulian pemerintah membina keunggulan SDM yang tersedia di daerah secara optimal, melakukan pembinaan terhadap usaha UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja agar masyarakat menjadi sejahtera dan kemampuan membudayakan semua elemen anak bangsa yang beragam bekerjasama dengan segenap aparat pemerintah untuk memelihara lingkungan agar tetap bersahabat dalam kehidupan. Namun demikian, adanya keterbatasan sarana angkutan air mengakibatkan harga sembako melambung dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, nilai ekspor NTB lima tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Sebaliknya, nilai impor total tidak mengalami perubahan signifikan bahkan cenderung stagnan. Tahun 1998 ekspor NTB keluar negeri baru mencapai Rp 83,27 M, meningkat menjadi sekitar Rp 4,108 T tahun 2002, dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp 4,412 T, sedangkan untuk ekspor antar provinsi justru tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan jika dibandingkan dengan Tahun 1999 justru pada Tahun 2002 mengalami penurunan. Prospek ekonomi makro ini pun lebih diperkuat dengan telah berkurangnya peran impor.

Terkait dengan sektor indeks pembangunan manusia yang merupakan sasaran dari pembangunan abad milenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)*, secara absolut pada seluruh komponen yang mempengaruhi, Indeks Pembangunan Manusia NTB masih berada pada peringkat terendah diantara 32 provinsi di Indonesia. Dari indikator pendidikan, angka buta aksara di NTB tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional.

Prosentase penduduk umur 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis di NTB pada Tahun 1999 sekitar 27,2 % dan angka tersebut merupakan penurunan yang moderat apabila dibandingkan dengan angka tahun 1996 sebesar 32,0 %. Angka buta aksara di perdesaan lebih tinggi (sekitar 30 %) dibandingkan perkotaan (10-15 %). Selanjutnya, Angka Melek Huruf sejak 1999 sampai 2002 mengalami peningkatan.

Dalam sektor kesehatan, rata-rata lama sakit penduduk NTB pada tahun 2002 adalah 6,47 hari lebih tinggi dari angka nasional selama 4 hari. Namun demikian, posisi derajat kesehatan masyarakat Provinsi NTB sudah berada pada posisi tengah secara nasional. Angka Kematian Bayi (AKB) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, AKB di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 69,30 pada tahun 1999 menjadi 58,14 pada tahun 2002.

Jumlah Penduduk Miskin di NTB pada Maret 2010 mencapai 1.009.352 orang (21,55%) mengalami penurunan pada tahun sebelumnya (Maret tahun 2009) yang berjumlah sekitar 1.050.948 (22,78 persen). Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan untuk daerah perkotaan berjumlah sekitar 552.617 jiwa (28,16 persen) sedangkan di daerah pedesaan berjumlah sekitar 456.735 (16,78 persen).

Garis kemiskinan pada tahun 2010 sebesar Rp. 196.185,- mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2009 yakni sekitar Rp. 185.025,-. Garis kemiskinan makanan (GKM) jauh lebih besar dibandingkan dengan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Pada keadaan Maret 2010 untuk GKM sebesar Rp. 149.358,- sedangkan untuk GKBM sekitar Rp. 46.827,-. Pada Maret 2010, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di daerah pedesaan yakni Rp. 223.784,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 176.283,- untuk daerah pedesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2010 mencapai 3,77 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) yang mencapai 5,15, demikian juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 1,68 pada tahun 2009 menjadi 1,01 pada tahun 2010.

Secara umum, dilaporkan bahwa kondisi NTB aman. Beberapa daerah yang rawan konflik adalah di Lombok Tengah, Sumbawa atau Bima, seperti di Ngali. Saat ini, sebagian besar konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan karena adanya perbedaan etnis atau agama, melainkan karena faktor lain, seperti perebutan lahan, tindakan kekerasan terhadap pelaku kriminal dan lain-lain. Bahkan konflik saat ini justru terjadi dalam masyarakat yang memiliki satu kesamaan suku, agama dan bahkan satu keluarga.

NTB merupakan propinsi peringkat ke-2 (setelah Jawa Timur) sebagai propinsi pengirim TKI terbanyak yaitu sekitar 420 ribu orang. Permasalahannya adalah, banyak TKI yang pergi melalui PJTKI dengan kantor pusat tidak terletak di NTB. Di NTB ini ada sekitar 320 PJTKI tetapi hanya 18 yang berkantor pusat di NTB. Selebihnya merupakan PJTKI kantor cabang yang terletak di desa-desa sehingga dengan mudah dapat merekrut calon TKI. Bagi TKI yang memiliki destinasi Malaysia dan melalui PJTKI yang berkantor pusat di NTB, mereka bisa terbang langsung dari bandara NTB. Tetapi bagi TKI yang memiliki destinasi negara lain, seperti Arab Saudi, atau yang menggunakan PJTKI yang berkantor pusat di luar NTB, mereka harus terbang dari Jakarta. Permasalahannya, kerap aturan mengenai TKI di Jakarta dan NTB berbeda dan menyulitkan TKI itu sendiri sementara pemerintah daerah kesulitan dalam melakukan kontrol dan bantuan terhadap mereka. Sebagian besar

TKI yang bermasalah di luar negeri adalah yang berangkat dari Jakarta atau bandara lain di luar NTB.

Terkait Permendagri Nomor 11 tahun 2004 yang mengatur masalah Komunitas Intelijen Daerah, Pemprop NTB memberikan dukungan anggaran melalui APBD. Dalam setiap bulan diadakan rapat koordinasi untuk membahas informasi-informasi strategis dari berbagai sumber dimana outputnya didistribusikan kepada *stakeholder* di bidang intelijen maupun para pengguna informasi lainnya. Hanya saja, untuk tingkat kabupaten, kominda belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terjadi karena kabupaten/kota tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam bidang intelijen. Karena itu, tenaga intel di daerah adalah orang-orang lama yang seharusnya sudah dirotasi atau dimutasi tetapi tetap dipertahankan karena tidak ada penggantinya.

Terkait kunjungan kerja Komisi I DPR RI, Pemerintah Propinsi NTB menyampaikan saran dan permohonan:

1. Terkait dengan kekurangan SDM di bidang intelijen, Pemprop berharap pihak BIN memberikan pelatihan intelijen kepada orang-orang yang akan ditugaskan di Kominda.
2. Minta dukungan bagi pembangunan kawasan cepat tumbuh di Lombok Tengah yang akan dibangun sebuah bandara internasional agar kehidupan masyarakat di sekitar bandara dapat ikut terangkat ekonominya.
3. Untuk memperkuat kontrol terhadap PJTKI, mohon kiranya agar ada sebuah aturan yang menegaskan bahwa pembukaan kantor cabang TKI cabang paling rendah hanya sampai level kabupaten/kota, tidak sampai desa.

II. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI

1. BIDANG PERTAHANAN

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI ke Propinsi NTB melakukan kunjungan dan berdialog dengan Panglima Kodam IX/Udayana yang diwakili oleh Kasdam, Komandan Lanud Rembiga dan Komandan Lanal Mataram NTB.

Secara keseluruhan, kondisi bidang-bidang pertahanan yang ada masih jauh dari harapan dan dibawah standar kemampuan operasi minimal dan TOP/DSPP baik alutsista, kesejahteraan maupun sarana dan prasarana. Sehingga apabila ada kontijensi, maka satuan-satuan TNI yang berada di wilayah NTB diprediksi tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Berikut adalah laporan dan hasil temuan tim kunker Komisi I DPR RI di bidang pertahanan di Propinsi NTB:

a. Kodam IX/Udayana

Kodam IX/Udayana merupakan bagian dari TNI yang bertugas melaksanakan pertahanan matra darat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan RDTL serta melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat. Wilayah Kodam Udayana

memiliki perbatasan langsung dengan negara asing, yaitu Timor Leste dan Australia. Organisasi Kodam Udayana diperkuat oleh 25 Kodim serta 4 Yonif dan beberapa Detasemen selaku satuan pemukul penangkal ancaman kewilayahan yang kedudukannya tersebar di beberapa wilayah dengan kekuatan yang tersebar dan tidak seimbang dengan populasi penduduk yang ada.

Markas Kodam IX/Udayana berada di Bali. Di NTB, satuan pelaksana tertinggi adalah Korem 162/WB yang sekaligus menjadi tuan rumah bagi kunjungan kerja Komisi I DPR RI. Sedangkan jajaran satuan lainnya seperti Denzipur, Kikavser maupun Yonif Raider berada di Bali.

Paparan mengenai kondisi Kodam disampaikan oleh Kepala Staf Kodam IX/Udayana, Brigjen TNI Endar Priyanto yang didampingi oleh Komandan Korem 162/WB, Kolonel Inf. Heru Suryono. Berikut adalah beberapa temuan terkait Kodam IX/Udayana:

1. Secara organisasi, struktur Kodam IX/Udayana memiliki beberapa persoalan sebagai berikut:
 - a. Dislokasi pasukan dan organisasi yang lebih banyak terpusat di Bali membuat wilayah lain yang berada di bawah tugas dan tanggungjawab Kodam Udayana relatif terabaikan padahal potensi dan fakta ancaman, gangguan, tantangan maupun hambatan di wilayah NTB dan NTT sangat tinggi. Dengan kekurangan dalam sarana prasarana seperti transportasi maupun alat komunikasi maka satuan-satuan yang ada di Bali tidak akan dapat secara cepat memberikan dukungan dan bala bantuan apabila terjadi kontijensi di NTB maupun NTT.
 - b. Kelengkapan organisasi Kodam IX/Udayana jika dilihat dari luasnya wilayah dan beban berat tanggung jawab, kurang lengkap. Karena itu rencananya akan segera dibentuk penambahan satu batalyon infanteri yaitu Yonif 746 di Camplong, NTT. Namun hingga kini rencana tersebut belum terrealisir. Demikian juga dengan rencana pembentukan Yonif 741 sebagai pengganti Yonif 900/Raider, Yonzipur dan Yonkav di NTT belum dapat direalisasikan karena terkendala lahan yang belum tersedia atau belum mendapatkan persetujuan dari adat setempat.
 - c. Peningkatan satuan Deninteldam IX/Udayana dari tipe B menjadi tipe A belum didukung oleh kelengkapan personel maupun sarana dan prasarana.
 - d. SatBanPur yang dimiliki oleh Kodam IX/Udayana hanya terbatas kepada DenKalSur serta DenZiPur, dimana baik personel maupun lapsatnya tergolong telah usang dan hal ini tidak produksi digunakan dalam satu kesatuan operasional yang terpadu, olehnya diperlukan penambahan dari unit-unit lain beserta alkapsatnya.
 - e. SatBanMun yang dimiliki oleh Kodam IX/Udayana tidak sesuai dengan TOP/DSPP yang berlaku dan bila kesiapan yang dimiliki atau dihadapkan pada dinamika yang terjadi, diyakini Alkapsat yang telah dimiliki perlu diremajakan/dimodernisasikan.
 - Areal service perangkat kesehatan RenKesYah (Alat Rontgen sudah ± 2 thn tidak memiliki
 - TQ/Bakes yang tersedia berikut perangkat obat-obatan sangat terbatas dan demikian juga AMB (Ambulance) yang di miliki

- SatPur–BanPur serta Balak sangat tidak layak digunakan dalam mendukung kegiatan yang bersifat emergensi.
- f. SatKoter yang dimiliki Kodam IX/Udayana dengan jumlah 3 MaKoRem beserta 25 jajaran Kodam yang memiliki fasilitas baik pangkalan, sarana dan prasarana pendukung, berikut senjata dan amunisi yang tersedia sangat memprihatinkan dan hal ini jelas mengganggu terhadap pelaksanaan tugas operasi dalam rangka melaksanakan BINTER dan OMSP.
 - g. Sarana dan Prasarana pendukung operasional prajurit baik dari Allapsus–Lapsat dan sarana lainnya dirasakan tidak memadai, terlebih dislokasi pasukan yang dijadikan sebagai satuan pemukul kewilayahan letaknya tersebar dan sulit di jangkau dalam waktu yang singkat
2. Ditinjau dari aspek geografis, demografi dan sosial budaya, beberapa persoalan yang dimiliki oleh Kodam IX/Udayana adalah sebagai berikut:
- a. Kodam IX/Udayana memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki pengawasan terhadap 2 ALKI serta beberapa jalur penerbangan internasional serta pulau terluar.
 - b. Wilayah Kodam IX/Udayana, rentan dan rawan terhadap geliat dari dampak perkembangan politik, ekonomi, budaya serta Kamtibmas dan untuk menghadapi ancaman tersebut dibutuhkan kekuatan yang yang terintegrasi serta sepadan dan berimbang.
 - c. Masyarakat yang mendiami wilayah tiga propinsi di wilayah tanggung jawab Kodam IX/Udayana, sangat heterogen dan majemuk demikian pula dengan perbedaan tingkat kebudayaan sangat bervariasi, sehingga hal ini dapat menimbulkan gesekan–gesekan yang menjurus kepada masalah SARA.
 - d. Pihak Pemda hingga pihak Kepolisian daerah masih menepis bahwa daerahnya yang rawan terhadap premanisme serta penyakit masyarakat tidak bermasalah dan hal inilah yang menjadikan pihak kodam dengan jajarannya harus selalu bersiap diri agar tidak terdadak.
 - e. Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh aparatnya terkendala dengan fasilitas dan dukungan financial yang di berikan oleh Komando atas/ Negara.
 - f. Dalam rangka mendukung Pemda dan pihak Kepolisian setempat sesuai UU. RI No.34/2004, tentang TNI dalam OMSP dirasakan oleh pihak Kodam IX/Udayana, bahwa pemahaman mereka tentang tugas perbantuan sesuai PP No.39 tahun 1959 kurang di pahami sehingga pelaksanaan terhadap MDG’S sesuai amanah pemerintah, kurang dapat berjalan dengan lancar.
 - g. Kebijakan dan janji pemerintah sesuai UUD RI tahun 1945 pasal 33 tidak dapat dirasakan oleh masyarakat kebanyakan, sehingga hal ini menimbulkan krisis kepercayaan, harga sembako melambung, pengangguran, dan sebagainya dapat menimbulkan eksek terhadap hal-hal yang berbau SARA & hal ini bila dihadapkan kepada kesiapan operasional dilapangan terhadap dinamika yang mungkin timbul, pihak Kodam IX/ Udayana merasakan adanya kesulitan dalam penanganannya.
3. Sarana transportasi yang dimiliki satuan-satuan Kodam IX/Udayana sangat terbatas. Wilayah Kodam IX/Udayana terdiri dari ratusan pulau yang tersebar dan terpisah oleh lautan. Namun Kodam justru tidak memiliki

sarana transportasi laut. Sedangkan transportasi udara hanya satu dengan status BKO. Hal tersebut menjadikan kendala besar bagi pelaksanaan pemindahan pasukan dihadapkan dengan dislokasi satuan yang tersebar. Saat ini transportasi yang digunakan adalah dengan cara memanfaatkan sarana transportasi swasta/komersil.

4. Sarana komunikasi belum dapat mengintegrasikan komunikasi antara makodam dengan satuan jajaran korem 161/WS di wilayah NTT dan dengan satuan jajaran Korem 162/WB di wilayah NTB. Alat komunikasi yang digunakan adalah HT dengan jangkauan yang sangat terbatas. Selain HT, juga masih digunakan PRC 77 yang usianya sudah tua, kondisinya rusak dan berat. Komunikasi saat ini kemudian mengandalkan sarana dan teknologi *handphone* yang tingkat keamanan dan kerahasiaannya tidak dapat terjamin. Idealnya, alat komunikasi yang digunakan saat ini adalah yang menyatu dengan helm tanpa perlu ransel sehingga tangan masih bisa digunakan untuk tugas lainnya.
5. Jumlah senjata yang ada sangat terbatas dengan kondisi laras dan galangan sudah aus, khususnya senjata yang dimiliki oleh Satbanmin dan Satbalak. Akibatnya, presisi senjata tersebut jauh tidak lagi akurat. Hal ini diperburuk oleh jumlah amunisi untuk latihan menembak yang sangat terbatas. Jatah amunisi untuk latihan menembak prajurit dengan menggunakan pistol hanya 10 butir dalam tiga bulan.
6. Untuk wilayah NTB, lapangan untuk latihan menembak para prajurit belum memenuhi standar, sedangkan di NTT tidak ada lapangan latihan menembak. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan prajurit dalam menembak sasaran dengan cepat dan tepat.
7. Untuk kendaraan tempur, Kodam Udayana hanya memiliki 3 unit tapi semuanya dalam kondisi rusak dan tidak bisa diperbaiki karena pabrik yang memproduksi kendaraan tersebut di Inggris sudah tutup
8. Satbanpur, Satbanmin dan Satkowil tidak memiliki kompas dan GPS untuk melaksanakan latihan.
9. Kondisi pangkalan satuan Kodam baik perkantoran maupun perumahan belum tersedia sepenuhnya khususnya perumahan/asrama untuk prajurit di satuan kewilayahan dan satuan non tempur sehingga masih banyak prajurit yang tinggal di luar asrama baik dengan cara mengontrak rumah ataupun menyewa ruangan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan operasional
10. Minimnya anggaran untuk bina teritorial yang hanya 55 juta/tahun. Demikian juga untuk komunikasi sosial. Korem 162/WB, umpamanya, hanya mendapat anggaran 19 juta/tahun.
11. Terkait tingkat kesejahteraan, personel babinsa yang merupakan ujung tombak di lapangan hanya mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 50.000 per orang per bulan. Sementara kesejahteraan prajurit lainnya juga kurang terpenuhi terkait tingginya harga pangan dan bahan pokok.

12. Salah satu tugas prioritas Kodam IX/Udayana adalah menjaga keamanan wilayah perbatasan antara RI dan Timor Leste yang memiliki potensi tinggi bagi terjadinya konflik karena masih terdapat beberapa titik yang menjadi wilayah sengketa bagi masyarakat kedua negara. Namun kekuatan TNI di perbatasan sangat lemah. Karenanya, pos perbatasan diisi oleh polisi.
13. Beberapa permasalahan hubungan Indonesia – Timor Leste baik terkait perbatasan maupun kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang pro integrasi yang ada di Timor Leste adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan di Timor Leste yang berdekatan dengan perbatasan sangat menonjol dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di wilayah perbatasan. Kondisi ini melahirkan gangguan psikologis seperti kecemburuan dan rasa rendah diri.
 - b. Repatriasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masyarakat Indonesia dan kelompok pro integrasi yang berada di Timor Leste (dan yang berada di NTT) merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
 - c. Masih banyak organisasi asing yang mengatasnamakan bantuan kemanusiaan untuk Timor Leste padahal masyarakat internasional sendiri telah menghentikan bantuan untuk Timor Leste. Keberadaan mereka banyak yang tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dikhawatirkan menjadi agen-agen penyusup demi kepentingan negara tertentu. Kemiripan ras, fisik serta kemampuan bahasa Indonesia dan lokal yang baik membuat perbedaan antara warga NTT dengan Timor Leste sangat sulit dikenali. Keadaan ini banyak dimanfaatkan oleh LSM-LSM asing maupun warga Timor Leste untuk mengambil keuntungan.
 - d. Terdapat beberapa wilayah perbatasan yang masih menjadi sengketa antara masyarakat kedua negara. Diantara beberapa wilayah tersebut, yang menonjol adalah yang terjadi di Oecussi. Masyarakat kedua belah pihak terlibat saling klaim atas lahan yang ada. Kondisi ini kemudian disampaikan kepada pemerintah Timor Leste dan ditanggapi secara positif dengan langsung memerintahkan penarikan terhadap masyarakat yang ada di wilayah sengketa.
14. Beberapa kendala dalam melakukan operasi pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan adalah:
 - a. Tidak tersedia air tawar, khususnya di Pulau Batek dan Dana Rote sehingga harus mengandalkan pasokan dari daratan atau tempat lain dengan alat angkut yang ada atau meminjam perahu nelayan yang memakan waktu lama. Antisipasi kekurangan atau keterlambatan pengiriman air tawar adalah dengan melakukan tadah hujan.
 - b. Tidak ada pos permanen sehingga terpaksa menggunakan tenda pleton dan bangunan navigasi yang kondisinya sudah rusak.
15. Wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya di Bali, merupakan wilayah yang kerap dikunjungi oleh tamu-tamu penting (VVIP) baik dari dalam maupun luar negeri sehingga perlu dilakukan operasi pengamanan yang bersifat ekstra. Namun dalam prakteknya, operasi pengamanan VVIP ini juga memiliki hambatan, yaitu
 - a. Terbatasnya kendaraan ringan untuk pengawalan dan tidak adanya kendaraan Pam Matan bergerak sehingga menghambat pelaksanaan

operasi Pam VVIP. Kendaraan pengawalan yang ada adalah pinjaman dari satuan polisi militer dan pemda setempat.

- b. Beberapa peralatan jihandak yang ada tidak lagi dapat dipergunakan karena melebihi usia pakai seperti *handheld explosive detector* dan *handheld metal detector* sehingga pelaksanaan sterilisasi lebih banyak dilakukan secara manual. Secara teknis hal ini sangat memakan waktu dan tidak dapat memantau secara dini ancaman ledakan yang ada. Akibatnya, Jihandak TNI mengalami ketergantungan terhadap jihandak dari Polda setempat

Terkait dengan kondisi dan ragam persoalan yang ada di Kodam IX/Udayana tersebut, Kodam IX/Udayana menyampaikan permohonan agar:

1. Percepatan penambahan tiga brigif untuk membantu memperkuat gelar satuan yang ada sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mempertahankan wilayah RI dari kemungkinan pelanggaran kedaulatan darat wilayah Kodam IX/Udayana
2. Pemenuhan alutsista, sarana dan prasarana baik di markas komando satuan kewilayahan maupun di jajaran satuan lain, khususnya di wilayah perbatasan, dan juga kelengkapan prajurit perorangan.
3. Peningkatan kesejahteraan prajurit terkait mahalanya harga pangan dan bahan pokok di wilayah kerja Kodam Udayana
4. Perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan Timor Leste untuk mencegah terjadinya penyusupan atau penyebaran konflik internal Timor Leste ke wilayah Indonesia terkait dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum di Timor Leste pada tahun 2011.
5. Dukungan alat komunikasi yang dapat menghubungkan dan menjangkau 676 pulau yang ada di wilayah Kodam Udayana.
6. Penambahan anggaran untuk bina teritorial, komunikasi sosial dan program tentara manunggal masuk desa (TMMD)

b. Pangkalan TNI Angkatan Udara Rembiga - NTB

Pangkalan TNI Angkatan Udara Rembiga – NTB atau Lanud Rembiga merupakan satuan pelaksana operasi Koopsau II yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, mendukung dan melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan opsional satuannya serta menyelenggarakan pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan bagi satuan lainnya. Komandan Lanud Rembiga saat ini adalah Letkol (PNB) Antariksa Anando.

Lanud Rembiga dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada beberapa permasalahan/kendala yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di bidang operasional:
 - a. Lanud Rembiga belum memiliki *gorund power unit* sendiri sehingga untuk mendukung kegiatan penerbangan masih tergantung dengan pihak luar seperti meminjam ke PT. Merpati/Garuda.
 - b. Terkait dengan rencana pengembangan Bandara Salahudin di Bima dan rencana perpanjangan landas pacu dari 1600 m menjadi 2100 m menjadikan keberadaan TNU Angkatan Udara sangat diperlukan. Bima merupakan salah satu wilayah rawan gempa. Dengan pelebaran landas pacu, maka memungkinkan bandara tersebut untuk dilandasi oleh Hercules pembawa bekal dan bantuan bencana. Bandara tersebut juga

menjadi transit pesawat-pesawat militer yang menuju kawasan Indonesia Timur. Hingga saat ini, belum ada detasemen TNI AU yang melayani pesawat-pesawat transit tersebut.

- c. Bandara Salahudin (di Bima) saat ini sering digunakan oleh pesawat TNI AU (helikopter) untuk *refuel*, namun belum ada personel TNI AU yang bertugas disana karena belum dibukanya perwakilan ataupun detasemen di tempat tersebut. Sehingga bila ada kegiatan *refuel* diutus satu personel BMP untuk berkoordinasi dengan Pertamina untuk menanganinya.
2. Kondisi personel dan kesejahteraan:
 - a. Kekuatan personel adalah 131 orang dari DSP 217 atau hanya memenuhi 58% sehingga beberapa pos dan jabatan belum dapat terisi.
 - b. Kondisi rumah dinas dan mess sudah tua. Beberapa diantara sudah tidak layak huni.
 - c. Kondisi kazenering sudah tua. Dana yang dialokasikan untuk kazenering dialokasikan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih penting.
 - d. Tidak memiliki mobil khusus untuk pergerakan dukungan konsumsi bagi anggota di lapangan
 - e. Terkait seragam dan kelengkapan personel, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI juga menerima laporan bahwa perlengkapan yang diterima oleh prajurit tidak lengkap seperti yang seharusnya. Pada tahun 2010, dari 31 atribut seragam dan kelengkapan yang seharusnya diterima oleh prajurit di Lanud Rembiga, hanya 13 atribut saja yang diterima.
 3. Bidang Logistik:
 - a. Lanud Rembiga memiliki 108 senjata baik laras panjang maupun pendek. Semuanya dalam kondisi baik. Kondisi tersebut bukan karena didukung oleh perawatan dan suku cadang yang ada tetapi karena jarang digunakan.
 - b. Senjata laras panjang yang ada kurang memadai untuk meningkatkan kemampuan menembak dan mendukung kegiatan operasi karena sudah banyak yang rusak atau aus dimakan usia sehingga tidak memiliki akurasi yang tepat.
 - c. Kendaraan yang ada sebagai alat transportasi sebagian besar dalam kondisi rusak dan berusia tua dengan kondisi yang rendah.
 - d. Demikian juga dengan bangunan perkantoran usianya sudah cukup tua dan kropos sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan seperti roboh atau ambruk.
 - e. Ketersediaan suplai air pam kurang lancar, kecuali pada pagi dan malam hari. Itupun dengan debit air yang sangat kecil.
 - f. Daerah NTB sering mengalami pemadaman listrik. Karenanya, Lanud Rembiga menyediakan genset selain sebagai cadangan dan pengganti aliran listrik PLN yang sering putus, juga untuk mendukung keperluan lain. Namun demikian, Lanud Rembiga belum memiliki shelter sebagai tempat untuk melindungi genset yang ada dari kerusakan.
 - g. Belum ada baseops dan apron di Bandara Internasional Lombok yang akan beroperasi nanti, menggantikan Bandara Ampenan.
 - h. Alat komunikasi yang ada masih kurang. *Repeater* yang dimiliki hanya satu untuk 2 HT. Diperlukan setidaknya penambahan satu set radio

SSBTS 870 kenwood dan dua set repeater/HT UHF FM sebanyak 20 Ea untuk komunikasi intern AWR Rambang dan dukungan operasional di Bandara Internasional Lombok yang baru nanti.

- i. Radar yang dimiliki hanya mampu mengirimkan sinyal dan komando atas tanpa dapat melakukan kegiatan baru sergap terhadap sasaran yang diduga adalah lawan yang akan melakukan penyusupan.
 - j. Senjata bagi pengamanan bandara yang dimiliki oleh Paskhas "Triplegun" tidak dimiliki oleh satuan ini
 - k. Senjata yang dimiliki satuan ini baik senjata genggam hingga senjata laras panjang merupakan senjata asset lama yaitu G3,M16/A1 dan Pistol N 46 dengan jumlah amunisi yang terbatas, sehingga tingkat ketrampilan prajurit dalam latihan atau kemampuan menembak cukup memprihatinkan.
4. Lanud Rembiga tidak memiliki satuan Paskhas yang melekat dan dalam mendukung operasi pengamanan terhadap bandara, Lanud mengandalkan satuan anjing dan pengamanan manual yang tersedia.
 5. Untuk intelpam dan POM, selain adanya keterbatasan personel dan alat komunikasi, juga tidak dilengkapi dengan kendaraan patroli dan pengawalan. Kendaraan pengawalan yang digunakan saat ini memanfaatkan kendaraan pribadi.
 6. POM tidak memiliki sel tahanan yang representatif sehingga belum dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tahanan militer secara lebih optimal.
 7. Kelengkapn fasilitas klinik yang ada sangat terbatas sehingga harus merujuk ke RSAD/RSU Mataram apabila ada pasien yang memerlukan tindakan lebih intensif.
 8. Lanud Rembiga memiliki 1 unit ambulan yang sangat modern sebagai hibah dari Pemerintah Brazil. Namun demikian, penggunaan kendaraan tersebut sangat terbatas sebab biaya suku cadang dan perawatan kendaraan tersebut sangat jarang dan sangat mahal. Bahkan montir-montir lokal yang ada tidak berani melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada karena spesifikasi kendaraan dan onderdil yang sangat berbeda.

Terkait dengan beberapa kendala dan hambatan tersebut, Komandan Lanud Rembiga memohon bantuan kepada tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI untuk dapat mendesak pemerintah pusat agar dapat memenuhi kekurangan-kekuarangan yang ada demi terlaksananya tugas pokok Lanud Rembiga dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, khususnya kedaulatan udara di wilayah NTB.

c. Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram - NTB

Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram – NTB atau Lanal Mataram adalah bagian tidak terpisahkan dari satuan TNI Angkatan Laut yang barada dalam jajaran Komando Pangkalan Utama TNI AL Kupang. Lanal Mataram adalah pangkalan TNI AL bertipe B dengan kewenangan mengontrol ALKI II dan berbatasan langsung dengan Australia. Beberapa tugas utama Lanal Mataram adalah menyelenggarakan

dukungan logistik dan administrasi bagi unsur TNI AL secara terbatas; menyelenggarakan fungsi pangkalan dalam tugas kamla, binpotmar dan bintermatla dan tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan baik tugas-tugas OMP maupun OMSP. Komandan Lanal Mataram saat ini adalah Kol (Mar) Budi Purnama.

Berikut adalah beberapa temuan tim kunjungan Komisi I DPR RI ke Lanal Mataram:

1. Jumlah personel Lanal Mataram tidak memenuhi DSP yaitu hanya 79% saja. Kondisi ini berpengaruh terhadap terhadap jumlah personel yang seharusnya disiagakan di berbagai posisi. Sebagai contoh, setiap posal seharusnya diawaki oleh 6 personel tetapi dalam kenyataannya hanya bisa diisi oleh 2 personel.
2. Pangkalan TNI AL dengan kelas Lanal hanya memiliki kewenangan mengoperasikan kapal sekelas KAL. Lanal Mataram memiliki 2 jenis KAL, yaitu KAL 28 dan KAL 12. Untuk KAL 28 (Ampenan), kondisinya kritis dan karenanya tidak berani digunakan untuk operasi. Dengan demikian, KAL yang bisa dioperasikan hanya KAL 12 (Ujung Pangkah). Namun, jumlah KAL 12 yang ada terbatas dari yang seharusnya 5 unit, tetapi hanya terpenuhi 1 unit dengan kondisi yang tidak fit dan terbuat dari bahan *fiber glass* yang tidak tahan hempasan gelombang kuat. Sehingga Lanal Mataram harus menghitung kondisi alam apabila akan melakukan patroli.
3. Lanal Mataram tidak memiliki lahan yang cukup sebagai tempat latihan prajurit. Di depan Lanal Mataram ada sebuah lapangan sepak bola yang pemanfaatannya untuk latihan namun secara hukum tidak berketetapan (bersertifikat) sebagai milik Lanal Mataram. Lapangan tersebut statusnya selalu berubah-ubah. Pada awalnya milik TNI AL namun kemudian oleh Pemda dianggap sebagai lahan terlantar dan kini tersertifikasi sebagai lahan milik pemda sehingga Angkatan laut hanya berstatus pinjam. Akibatnya, Lanal Mataram tidak bisa mengajukan perbaikan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan latihan karena statusnya bukan hak milik. Lanal Mataram berharap agar lahan tersebut secara hukum tersertifikasi atas nama Angkatan Laut yang akan digunakan sebagai latihan bagi prajurit.
4. Lanal Mataram belum memiliki layanan pelabuhan TNI AL baik di laut barat maupun laut timur. Idealnya, di NTB ini harus memiliki dermaga laut untuk singgah kapal-kapal TNI Angkatan Laut di 3 titik strategis.
5. Di NTB belum tersedia dermaga umum yang memiliki fasilitas SPBU untuk pengisian BBM kapal sehingga BBM harus diambil dari tempat lain yang jauhnya kurang lebih 1 jam perjalanan. Untuk keperluan 8 ton BBM saja, harus pulang pergi sebanyak 4 kali dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Padahal keperluan BBM KAL 42 adalah 22-24 ton BBM. Akibatnya, kapal-kapal TNI AL yang harus bekal ulang BBM terpaksa menunggu 3 hari sampai 2 minggu sementara kapal-kapal tersebut tidak boleh berlabuh lebih dari 3 hari. Kondisi ini sudah berlangsung lama, sejak Lanal Mataram berdiri. Agar cepat, maka meminta bantuan Pertamina tetapi harus membayar sejumlah Rp. 600.000 untuk setiap 5 ton. Jika yang datang adalah KRI

dengan kebutuhan BBM 50 ton, maka biayanya akan mahal sementara anggaran tidak ada.

6. Belum ada listrik darat yang berfungsi sebagai pemasok listrik terhadap kapal-kapal TNI AL yang sandar untuk menggantikan generator atau genset kapal. Sehingga selama kapal itu sandar, selama itu pula generator harus tetap nyala. Kondisi ini membuat pemborosan dan mempercepat kerusakan generator.
7. Kekuatan untuk melaksanakan tugas OMSP sangat terbatas. Jumlah perahu karet SAR hanya 8 buah dengan motor tempel yang sudah sangat tua. Sementara alat selam hanya 3 buah.
8. Lanal Mataram memiliki 6 pos Angkatan Laut (posal) dan 4 pos pemantau (posmat). Untuk posal Ampenan tidak bisa digunakan lagi karena terjadi abrasi pantai dan dekat dengan rumah penduduk. Sedangkan posal yang lain masih berfungsi. Untuk posmat, seluruhnya berstatus persiapan. Pendirian posmat merupakan inisiatif Lanal untuk mengantisipasi dan mengontrol aktifitas yang ada.
 - a. Posmat Lembar menggunakan gedung milik pelindo dengan status sewa Rp. 600.000 pertahun
 - b. Posmat Kolo didirikan karena merupakan pintu gerbang masuk ke pelabuhan Bima
 - c. Posmat Gili Matra didirikan karena di wilayah ini banyak kapal-kapal layar asing yang masuk tanpa pemeriksaan barang dan dokumen
 - d. Posmat Maluku didirikan karena di wilayah ini ada kegiatan bongkar muat kapal-kapal PT. Newmont yang perlu diawasi. Bupati setempat telah menyetujui untuk memfasilitasi posmat, tetapi hingga 4 bulan ini belum terrealisir.Pos-pos tersebut fasilitas sarana dan prasaranya kurang terdukung, rata-rata hanya dilengkapi oleh 1 perahu motor yang usianya sudah tua. Perhatian dari pemerintah setempat dinilai kurang. Sehingga apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum di laut, TNI AL tidak bisa melakukan pengejaran karena kapal-kapal pelaku kejahatan jauh lebih bagus dan lebih cepat.
9. Terkait dengan keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana ini, Lanal Mataram sering mengadakan "patroli palsu" yaitu menginformasikan kepada masyarakat mengenai kegiatan patroli yang akan diadakan tetapi sebenarnya tidak ada patroli. Informasi tersebut sedikit banyak membuat pihak-pihak yang hendak melakukan pelanggaran mengurungkan niatnya. Namun dalam jangka panjang, apabila kondisi ini sudah diketahui oleh masyarakat, sangat berbahaya.
10. Minimnya anggaran untuk binpotmar. Selama 1 tahun hanya sekitar 8 jutaan.
11. Untuk latihan menembak, digunakan senjata sejenis AK dan M-16 dengan kondisi yang sudah tua dan amunisi terbatas.
12. Kelengkapan radar sebagai alat bantu pantau yang tersedia dipangkalan tidak memenuhi standar yang diharapkan.

13. TOP dan DSPP yang dimiliki oleh satuan ini sangat terbatas jumlahnya terlebih personilnya hanya mencapai 54% dengan jenis senjata yang dimiliki satuan ini terdiri dari beragam jenis antara lain AK47 dan M16-AI dengan jumlah amunisi yang terbatas kondisi ini berpengaruh terhadap pembinaan menembak bagi para prajuritnya untuk menjadi profesional sulit dicapai.

Terkait dengan beberapa kendala dan permasalahan tersebut di atas, Lanal Mataram menyampaikan saran dan permohonan kepada Komisi I DPR RI untuk:

1. Mendukung pembangunan dan ketersediaan dermaga khusus TNI AL yang berfungsi meningkatkan pelayanan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlabuh di Lanal Mataram sehingga mempercepat tugas pokok TNI AL
2. Peningkatan fasilitas pelabuhan di dermaga Lembar untuk mendukung bekal ulang bagi kapal-kapal TNI AL yang berlabuh, seperti pengisian ulang BBM
3. Pengadaan alutsista yang memadai dan sesuai kebutuhan M.E.F TNI AL

2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terkait dengan bidang tugas komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI mengunjungi Kantor TVRI Mataram dan menerima laporan dan masukan dari 3 unsur, yaitu kepala TVRI NTB, Drs. Nono Susilo Ilhamdono; Kepala RRI NTB, Drs. Agung Susetyo; dan Ketua KPID NTB, Badrun MM. Bidang-bidang komunikasi dan informasi yang ada di NTB secara umum sangat memprihatinkan akibat kurangnya dukungan anggaran dan perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap mereka. Selain ketiga instansi tersebut, Komisi I DPR RI juga menerima paparan singkat dari satu lembaga penyiaran swasta di NTB, yaitu Radio Global. Berikut adalah hasil dari kunjungan tersebut:

1. TVRI stasiun NTB terletak di Mataram dan memiliki 9 satuan pemancar yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima. TVRI NTB pertama kali mengudara pada 29 Agustus 2009 dengan klasifikasi tipe C. Siaran lokal TVRI NTB mendapatkan slot waktu dari jam 16.00 – 20.00 (4 jam siaran) Berikut adalah beberapa permasalahan yang ada di TVRI NTB:
 - a. Dari sembilan stasiun pemancar yang ada, hanya dua pemancar saja yang dapat melakukan siaran lokal yaitu yang berada di Lombok Tengah dan di Mataram. Sisanya hanya berfungsi sebagai stasiun relay untuk siaran TVRI nasional.
 - b. Jangkauan siaran TVRI NTB belum bisa diterima oleh seluruh masyarakat NTB disebabkan topografi wilayah NTB sehingga diperlukan penambahan satuan pemancar daerah dan penggantian menara serta pemancar lama yang usianya sudah tua yang rata-rata berusia 20 tahun
 - c. Peralatan studio dan pemancar TVRI NTB menggunakan jaringan listrik PLN dan genset sebagai cadangan. Namun ada 3 pemancar yang seluruhnya menggunakan genset karena belum teraliri jaringan PLN.

- d. Kondisi menara pemancar mengalami korosi 40% dan cat sudah pudar. Khusus menara pemancar di Bima, korosinya sudah sangat parah dan perlu diganti.
- e. Kondisi peralatan studio II yang menempati bekas garasi terdapat 3 set kamera yang seluruhnya belum standar penyiaran.
- f. Peralatan *production control* tidak dilengkapi oleh *master control*

Terkait kondisi yang ada tersebut, TVRI NTB menyampaikan saran dan harapan sebagai berikut:

- a. Keberadaan status LPP TVRI menjadi lebih baik
 - b. Sumber pembiayaan secara keseluruhan ditanggung oleh APBD
 - c. Terwujudnya studio modern dengan penggunaan teknologi penyiaran televis internet
 - d. Terdukungnya SDM yang memenuhi kualifikasi
 - e. Adanya penambahan satuan pemancar daerah, penggantian menara lama dan penggantian pemancar lama yang sudah tua usianya.
2. RRI Mataram mengudara melalui 3 program (Pro 1 FM, Pro 2 FM dan Pro 3 FM) dengan pemancar 10 unit yang terpasang pada 8 titik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh RRI Mataram adalah:
- a. Siaran RRI tidak seluruhnya dapat tertangkap oleh masyarakat NTB yang masuk dalam *coverage area* RRI. Jangkauan pemancar RRI di Pulau Lombok mencapai 90%. Tetapi untuk pulau Sumbawa hanya terjangkau 40% saja.
 - b. Beberapa pemancar yang ada powernya kecil dan terlalu banyak unit antena yang terpasang di pemancar-pemancar tersebut.
 - c. Program Pro 3 FM belum memiliki pemancar permanen dan powernya masih kecil
 - d. Banyak daerah yang *blank spot* karena topografi NTB yang berbentuk kepulauan dan berbukit.
 - e. Tenaga SDM kurang. Jumlah seluruh karyawan RRI hanya 135 orang lebih. 42 orang diantaranya berstatus pegawai honorer dan minta diangkat untuk jadi PNS karena telah lama mengabdikan.
3. KPID NTB menyampaikan laporan sebagai berikut:
- a. Di NTB terdapat 125 lembaga penyiaran yang sebagian besarnya adalah lembaga penyiaran komunitas. Sekitar 70 lembaga penyiaran proses perijinannya menumpuk di dinas Kominfo. Hanya 5 saja yang sudah menandatangani izin prinsip penyiaran.
 - b. Dari seluruh lembaga siaran yang ada, 70% konten acaranya bersifat hiburan.
 - c. Ada 4 TV lokal di NTB dengan rata-rata jumlah jam siaran hanya 2 jam karena keterbatasan sarana prasana
 - d. Ada 8 stasiun televisi nasional yang masuk ke NTB, tetapi hanya menjangkau 20% luas wilayah NTB saja. Sistem siaran ber jaringan belum dapat berjalan dengan baik. KPID tidak bisa memaksa televisi swasta nasional yang ada untuk memperluas jaringannya. Sehingga 80% wilayah NTB adalah *blank spot area*.
 - e. Untuk mensiasati wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh televisi, masyarakat kemudian mendirikan tv-tv kabel yang jumlahnya mencapai 1500-an. Masyarakat yang ingin mengakses tv kabel

dikenai bayaran sekitar 50.000,- perbulannya. Keberadaan mereka menimbulkan persoalan antara lain:

- i. Di satu sisi kehadiran mereka dibutuhkan masyarakat, tetapi di satu sisi lain tidak ada pengawasan terhadap mereka karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan instrumen untuk mengontrol mereka. Pemilik tv kabel menolak dikategorikan sebagai televisi berlangganan sehingga lolos dari pengawasan KPID.
- ii. Siaran mereka tidak hanya mengambil acara-acara tv berlangganan tetapi juga membuat acara khusus seperti kampanye pemilukada untuk kandidat tertentu. Apabila masyarakat tidak memilih kandidat yang dikampanyekan, masyarakat akan “dihukum” oleh tv tersebut dengan cara pemutusan siaran selama 1 bulan atau beberapa waktu tertentu.
- iii. Selain sebagai operator atas berbagai program yang dibuatnya sendiri, tv kabel juga “membajak” acara-acara yang ditayangkan oleh tv berlangganan dan tv-tv nasional lainnya dan bertindak seolah-olah sebagai distributor acara-acara tv berlangganan.
- iv. Sikap pemerintah daerah terhadap tv-tv kabel berbeda. Di beberapa daerah, tv kabel mendapat perlakuan istimewa karena dianggap investor yang memberikan pemasukan kepada kas desa/daerah.
- v. Jam siaran tv-tv kabel tersebut hingga larut malam dan kerap menayangkan film-film dewasa atau porno.

Mensikapi berbagai persoalan tersebut di atas, KPID NTB menyampaikan permohonan sebagai berikut:

- a. Agar proses perijinan di kominfo tidak berbelit-belit dan memakan proses waktu lama.
 - b. Ada aturan yang mengatur keberadaan tv kabel yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol mereka.
 - c. Agar KPID diberikan kewenangan dalam memberikan sanksi dan memberikan ijin prinsip penyiaran terhadap lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan ijin atau yang melakukan pelanggaran. Selama ini, KPID hanya memberikan teguran tetapi tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi. Teguran-teguran KPID tidak dijadikan pertimbangan oleh instansi pemberi izin dalam menilai layak tidaknya sebuah lembaga penyiaran mendapatkan perizinan.
4. Radio Global Mataram merupakan siaran radio swasta yang menitik beratkan program siarannya pada berita dan informasi. Terkait dengan pembiayaan yang bersumber pada iklan, radio Global meminta agar batasan *coverage* diperluas tidak dibatasi hanya 20 km saja. Ini karena para pengiklan selalu menjadikan luas *coverage area* sebagai salah satu pertimbangan dalam beriklan. Semakin luas *coverage area*, maka semakin besar pula pangsa pasar yang ada.

BAB III KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI, PENUTUP

I. KESIMPULAN

Muspida tingkat propinsi dalam setiap menghadapi dinamika yang terjadi di daerah hendaknya tetap bersikap positif dan tidak di benarkan untuk menutupi kelemahan yang terjadi hanya untuk mendapatkan penilaian baik yang semu dan justru hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan yang kronis sepanjang tahun dan sepanjang waktu di wilayah masing-masing. Bila hal tersebut dapat dikelola dengan baik serta benar niscaya akan mampu memberikan jalan keluar yang berarti bagi daerah masing-masing dengan catatan bahwa pihak Pemda di semua tingkatan harus mampu memberdayakan keunggulan yang ada di wilayah masing-masing untuk digunakan sebagai ujung tombak meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah dan mampu memberdayakan semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama secara padu, dengan selalu bekerjasama dengan pihak lain yang ada di daerah secara terintegrasi. Hal ini bila dilaksanakan dengan perencanaan yang amanah, teratur dan berkesinambungan niscaya riak-riak kerawanan yang mungkin timbul dan terjadi akan dapat di eliminir dan di tiadakan.

II. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi NTB, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, kepada seluruh mitra kerja Komisi I DPR RI di daerah, Komisi I DPR RI mendesak agar mitra mitra tersebut segera merancang dan mengajukan sebuah konsep yang ideal mengenai organisasinya, sesuai dengan TOP/DSPP. Konsep tersebut disampaikan kepada komando atau satuan organisasi di atasnya serta memberikan tembusan kepada Komisi I DPR RI untuk dapat diperjuangkan.
2. Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI melihat bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan perbatasan. Karena itu, Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan juga pemerintah daerah setempat dibantu oleh TNI dan Polri agar lebih serius menangani perbatasan melalui peningkatan keamanan, pembangunan ekonomi dan penyelesaian batas wilayah yang masih menjadi persoalan antara negara secara tegas.
3. Terkait dengan optimalisasi kominda, agar pihak pemerintah propinsi pro aktif meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menggerakkan dan mengadakan koordinasi terhadap satuan-satuan intelijen di beberapa instansi pemerintah yang memiliki badan intelijen selama kominda di kabipaten/kota belum terbentuk. Dan apabila sudah terbentuk, agar pemerintah kab/kota memberikan dukungan anggaran yang memadai.
4. Baik pihak Pemda maupun pihak Polisi Daerah sebaiknya tidak menutupi terhadap penyakit masyarakat yang terjadi dan dapat menjadi sumbu peledak akar alur yang diawali dengan gesekan politik yang menjurus kepada masalah SARA.

5. Kodam IX/Udayana agar menyampaikan saran kepada pemerintah daerah yang menangani perbatasan untuk segera melakukan peningkatan pembangunan guna mengimbangi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste agar tidak melahirkan kecemburuan serta agar perputaran ekonomi tidak tersedot ke perbatasan yang ada di wilayah Timor Leste. Pemerintah juga harus memberikan tekanan kepada Pemerintah Timor Leste untuk tidak melakukan propaganda provokatif dan negatif mengenai Indonesia kepada masyarakat internasional
6. Pihak Kodam IX/Udayana harus merencanakan, mengusulkan dan menciptakan terbentuknya 2 BRIGIF KTDAD. Guna mampu menangkal ancaman yang mungkin timbul secara BS dalam waktu yang cukup lama, sambil menunggu perkuatan dari pusat.
7. Kodam IX/Udayana agar mengintensifkan pengawasan dan kegiatan intelijen di beberapa wilayah perbatasan untuk mencegah tindakan kriminal seperti penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga untuk menyokong aktifitas RMS.
8. Pihak Lanal NTB, harus memiliki minimal 3 kapal jenis KAL yang baru untuk dapat di operasionalkan ke semua wilayahnya dan perlu dukungan 1 Mil Pasmar Harlan dan 1 kapal jenis ST yang sandar di Kupang untuk OMSP maupun OMP.
9. Pihak Lanud Rembiga harus di dukung oleh minimal 1 Ton Paskas dengan persenjataan Triplegun guna memberikan perlindungan bagi operasi satuan atas, berikut AMB untuk kegiatan VVIP/VIP.
10. Ikatan warga Timor Leste yang pro integrasi terhadap tanah Timor Leste maupun NTT sangat kuat karena adanya ikatan kultur maupun agama. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk mengikuti program transmigrasi. Sebagai bagian dari OMSP, Kodam IX/Udayana agar bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat menyelesaikan permasalahan repatriasi dan persoalan lainnya agar warga Timor Leste yang pro integrasi tidak merasa diabaikan oleh TNI dan Pemerintah Indonesia.
11. Pihak Pemda agar memberikan perhatian khusus terhadap segala kebutuhan TNI, khususnya kebutuhan lahan sebagai tempat untuk latihan bagi para prajurit maupun kebutuhan sarana prasaran lain yang keberadaannya justru akan membawa keuntungan bagi daerah yang ada dan membantu keamanan daerah dari berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti penyelundupan, *illegal fishing*, *illegal migration*, *smuggling*, *human trafficking* dan lain-lain
12. Jaringan Kominfo baik RRI, TVRI, KPID, TV Swasta dan radio siaran swasta berharap dengan revisi UU RI No.32/2007 tentang penyiaran, akan dapat memberikan kejelasan yang tegas akan status pegawai, peran KPID, anggaran langsung yang berasal dari APBN, penanganan terhadap operator yang melakukan fungsi ganda saat Pileg dan Pilkada.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi NTB dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 - 2011. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi sidang-sidang Komisi I DPR RI selanjutnya serta Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

KETUA TIM,

H. HAYONO ISMAN, S.IP
A-450

**DAFTAR NAMA TIM KUNKER KOMISI I DPR RI
KE PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	KET
1.	Hayono Isman, S.IP	450	F-PD	Ketua Tim
2.	Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	515	F-PD	Anggota Tim
3.	KRMTRoy Suryo Notodiprodjo	505	F-PD	Anggota Tim
4.	Paskalis Kossay, S.Pd., MM	276	F-PG	Anggota Tim
5.	Tjahjo Kumolo	344	F-PDIP	Anggota Tim
6.	H. Tri Tamtomo, SH	322	F-PDIP	Anggota Tim
7.	Helmy Fauzy	343	F-PDIP	Anggota Tim
8.	Yoyoh Yusroh	64	F-PKS	Anggota Tim
9.	Dra. Susaningtyas N.H., M.Si	9	F-HAN	Anggota Tim
10.	Supriyadi	Sekretariat Komisi I DPR RI		
11.	Jaka Adiwiguna, S.Sos	Sekretariat Komisi I DPR RI		
12.	Ibnur Khalid	Pemberitaan DPR RI		
13.	Tubagus Erif Faturrahman, M.Si	Staf Ahli Komisi I DPR RI		
14.	Marsma TNI Soeprpto	Pendamping KEMHAN		
15.	Kol. (Tek) Sugeng Sugiyono	Pendamping KEMHAN		
16.	Deden Doni Doris	Penghubung KEMHAN		